



TEMPYAC JAMBI

www.jambi.bpk.go.id

DARI KOKA

Dalam Tempoyac Jambi Edisi II Tahun 2015 kali ini, tim redaksi menyajikan berbagai artikel antara lain Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi TA 2014, Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi TA 2014, Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 serta Galeri Foto Kegiatan BPK Perwakilan Jambi selama bulan April s.d. Juni 2015.

Semoga Tempoyac Jambi Edisi II kali ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca setianya.

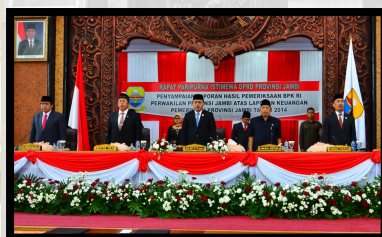
Salam Hangat,
Tim Redaksi

DAFTAR MENU

Menu	Hal
Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi TA 2014	1
LKPD Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun TA 2014 Mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2
BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2014	3
BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2014	4
Daftar Opini LKPD Ta 2013-2014	4
BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh TA 2014	5
Galeri Foto	6,7
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi Semester I Tahun 2015	8
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107	8

Berita Utama

Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi TA 2014



dan terstruktur “

“Opini atas laporan keuangan, secara tidak langsung menunjukkan bagaimana tingkat pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan Pengguna Anggaran. Tanggung jawab dari Pengelolaan Keuangan Daerah bukan semata tanggung jawab dari Kepala Daerah, namun merupakan tanggung jawab seluruh Kepala SKPD. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kerja yang kondusif, berkesinambun-

Demikian sambutan Anggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA, CA. pada Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Juni 2014 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala SKPD Provinsi Jambi, unsur Forkompinda, serta pejabat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

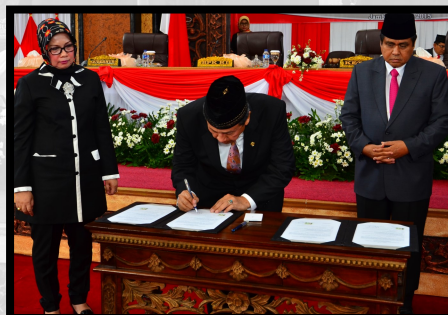


Dalam LHP yang diserahkan oleh Anggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA, CA., kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Cornelis Buston dan Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus, BPK RI memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WDP-DPP)** atas LKPD Provinsi Jambi TA 2014.

Paragraf Penjelas dalam opini WTP atas LKPD Provinsi Jambi terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih adanya beberapa Gedung dan Bangunan berupa rumah dinas yang belum dicatat dan dinilai dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
2. Masih adanya beberapa puluh kendaraan roda 4 (empat) dan beberapa puluh kendaraan roda 2 (dua) yang belum dinilai dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Anggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA, CA. menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP ini dan hasil pemeriksaan sebelumnya. Beliau juga berharap bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memanfaatkan LHP BPK dalam tugas dan fungsinya terutama tugas dan fungsi pengawasan.



LKPD Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun TA 2014 Mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Memenuhi ketentuan Undang-undang, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Jalan Pangeran Hidayat KM 6,5 Nomor 65 Kota Baru Jambi, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran (TA) 2014 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, **Dra. Eliza, M.M., Ak., CA.** kepada Bupati Batang Hari, **Sinwan, S.H.**, Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, **Muhammad Mahdan, S.Kom.**, Bupati Muaro Jambi, **H. Burhanuddin Mahir, S.H.**, Ketua DPRD Muaro Jambi, **Salma Mahir, S.E.**, Wakil Bupati Sarolangun **Drs. H. Pahrul Rozi, M.Si.**, dan Ketua DPRD Sarolangun, **H. Muhammad Syaihu.** Acara ini dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan para pejabat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.



Dari hasil pemeriksaan atas LKPD tiga kabupaten tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** terhadap Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaan laporan

keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Beberapa masalah yang berpengaruh terhadap opini LKPD, baik terkait kelemahan SPI maupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan antara lain: (1) Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS tidak diinventarisasi dan dicatat dalam Neraca Pemkab Batang Hari per 31 Desember, (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tidak memverifikasi dan memvalidasi data pelimpahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (3) Pemkab Muaro Jambi dalam Melaksanakan Kegiatan APBD Tahun 2014 Tidak Didukung dengan Ketersediaan Dana, (4) Pemkab Sarolangun tidak menerima pembayaran atas penjualan Tanah ke Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemkaasa untuk pembangunan perumahan PNS.

Terhadap berbagai temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati



antara lain agar : (1) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginventarisasi, mencatat, dan melaporkan Aset Tetap yang bersumber dari dana BOS ke Bidang Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang, (2) Memerintahkan Kepala Dispenda dan Kepala Bidang

Pendaftaran dan Penetapan supaya berkoordinasi dengan KPP Pratama Jambi untuk melakukan pendampingan/asistensi dalam memverifikasi dan memvalidasi data piutang PBB-P2 dan menyampaikan laporan database piutang PBB-P2 setelah divalidasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, (3) Merestrukturisasi APBD tahun 2015 dengan memperhitungkan ketersediaan dana yang harus disediakan dan kewajiban yang harus dibayar pada tahun 2015, (4) Mengambil langkah-langkah tegas untuk mengamankan hak Pemkab Sarolangun atas pelepasan hak atas Tanah seluas 259.868 m2, antara lain dengan meminta pelunasan atas tanah seluas 259.868 m2 kepada KPN Pemkaasa.

BPK juga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2014

Jambi, Rabu, (27 Mei 2015) - Memenuhi ketentuan Undang-Undang, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Jalan Panggeran Hidayat KM 6,5 Nomor 65 Kota Baru Jambi, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran (TA) 2014.



Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, **Dra. Eliza, M.M., Ak., CA.** kepada Ketua DPRD Kabupaten Merangin, **H. Zaidan Ismail, S.H.**, Bupati Merangin, **H. Al Haris, S.Sos., M.H.**, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, **Abdul Gafur**, dan Bupati Tanjung Jabung Timur, **Zumi Zola Zulkifli, STP., MA.** Acara ini dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan para pejabat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Dari hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Beberapa masalah yang berpengaruh terhadap opini LKPD, baik terkait kelemahan SPI maupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan antara lain: (1) Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 tidak diinventarisasi dan dicatat dalam

Neraca Pemkab Merangin per 31 Desember 2014, (2) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca tidak didukung dengan rincian DBMD dan sebanyak 11 unit tidak diketahui keberadaannya, (3) Hasil pungutan Retribusi Kekayaan Daerah berupa sewa kios/los pasar digunakan oleh Kepala UPTD Penataan Pasar dan petugas pemungut untuk kegiatan yang tidak ada anggarannya sebesar Rp82,13 juta, (4) Denda keterlambatan atas pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi minimal sebesar Rp15,90 juta belum ditagih dan terdapat kurang pungut retribusi sebesar Rp127,15 juta.

Terhadap berbagai temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati antara lain agar : (1) Menginstruksikan Kepala Disdik untuk menginventarisasi, mencatat, dan melaporkan aset tetap yang bersumber dari dana BOS ke BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD, (2) Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala DPKAD, Kepala Bidang Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah di DPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Pengurus Barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi seluruh Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, memutakhirkan DBMD sesuai kondisi yang sebenarnya, serta mengalokasikan biaya perencanaan dan pengawasan ke konstruksi fisik masing-masing Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, (3) Menginstruksikan Kepala DPPK dan Kepala UPTD Penataan Pasar Tahun 2013 dan 2014 mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah atas kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp82,13 juta, (4) Memerintahkan Kepala Dishubkominformasi untuk menagih dengan STRD atas denda keterlambatan pelunasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi minimal sebesar Rp15,90 juta dan menetapkan kekurangan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2014 sebesar Rp127,15 juta atau seluruhnya sebesar Rp143,05 juta kepada masing-masing Wajib Retribusi dan menyetorkan ke Kas Daerah.

BPK juga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2014



Memenuhi ketentuan Undang-Undang, BPK menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2014 pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

dengan mekanisme pengelolaan APBD, (3) Hasil pekerjaan tiga jasa konsultasi perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp398,34 juta, (4) Pembayaran ganda atas dua pekerjaan pada Bidang Perumahan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp545,38 juta.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, **Dra. Eliza, M.M., Ak., CA.** kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, **Syamsu Rizal, S.E., M.Si.**, Wakil Bupati Tebo, **Hamdi, S.Sos., M.M.** Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, **Faizal Riza, S.T., M.T.**, dan Bupati Tanjung Jabung Barat, **Drs. H. Usman Ermulan, M.M.** Acara ini dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan para pejabat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Dari hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Beberapa masalah yang berpengaruh terhadap opini LKPD, baik terkait kelemahan SPI maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain: (1) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13,19 miliar pada Neraca Pemkab Tebo tidak diketahui keberadaannya, (2) Pembayaran SPM LS kepada pihak ketiga menggunakan rekening titipan sementara sebesar Rp13,00 miliar tidak sesuai

Terhadap berbagai temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati antara lain agar : (1) Menyelesaikan proses inventarisasi seluruh aset yang dimiliki Kabupaten Tebo dan mencatat hasilnya di dalam LBMD, (2) Menetapkan peraturan tentang kebijakan keuangan menjelang akhir tahun anggaran antara lain batas akhir kontrak, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D serta surat edaran kepada BUD supaya tidak membuka rekening titipan sementara untuk menampung pembayaran kepada pihak ketiga, (3) Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo untuk menyeter kerugian keuangan daerah sebesar Rp398,34 juta ke Kas Daerah, (4) Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memper-tanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp353,65 juta dengan menyeterorkan ke Kas Daerah dan salinan bukti setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.



Daftar Opini LKPD TA 2013-2014

NO	ENTITAS	LKPD TA 2013	LKPD TA 2014
1.	Provinsi Jambi	WTP DPP	WTP DPP
2.	Kabupaten Batang Hari	WTP DPP	WDP
3.	Kabupaten Bungo	WDP	WDP
4.	Kabupaten Kerinci	WDP	WTP DPP
5.	Kabupaten Merangin	WDP	WDP
6.	Kabupaten Muaro Jambi	WTP	WDP
7.	Kabupaten Sarolangun	WDP	WDP
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	WDP	WDP
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	WTP DPP	WDP
10.	Kabupaten Tebo	WDP	WDP
11.	Kota Jambi	WDP	WDP
12.	Kota Sungai Penuh	WDP	WTP DPP

BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh TA 2014



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran (TA) 2014 pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, **Dra. Eliza, M.M., Ak., CA.** kepada Ketua DPRD Kota Jambi, **H. Muhammad Nasir, S.E.**, Wali Kota Jambi, **H. Syarif Fasha, M.E.**, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo, **Syarkoni Syam**, Bupati Bungo, **H. Sudirman Zaini, S.H., M.M.**, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, **Arpan Kamil, S.Pd.**, Bupati Kerinci, **Dr. H. Adi Rozal, M.Si.**, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, **Drs. Mulyadi Yacoub**, dan Wali Kota Sungai Penuh, **Drs. H. Asyafri Jaya Bakri, M.A.** Acara ini dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan para pejabat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.



Dari hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, BPK memberikan opini sebagai berikut:

1. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atas LKPD Kota Jambi dan Kabupaten Bungo;
2. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Kabupaten Kerinci; dan
3. **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)** atas LKPD Kota Sungai Penuh.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Beberapa masalah yang berpengaruh terhadap opini LKPD, baik terkait kelemahan SPI maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain: (1) Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS sejak

tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 belum seluruhnya diinventarisasi dan dicatat dalam Neraca Pemkot Jambi per 31 Desember 2014, (2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca Pemkab Bungo sebesar Rp13,45 miliar tidak didukung rincian dan tidak dapat ditelusuri rinciannya di LBMD, (3) Belanja Barang pada enam SKPD melebihi standar, pemahalan dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp112,49 juta, (4) Pemahalan belanja perjalanan dinas pada enam SKPD dan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp167,83 juta tidak sesuai dengan peraturan Wali Kota Sungai Penuh.

Terhadap berbagai temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota/ Bupati antara lain agar : (1) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi dan mencatat Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS ke DBMD sejak TA 2006 s.d. 2014, (2) Memerintahkan para Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk menelusuri perbedaan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13,45 miliar dan menyampaikan hasil laporan penelusuran kepada BPKAD untuk divalidasi, (3) Mempertanggungjawabkan kerugian daerah seluruhnya sebesar Rp112,49 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah, (4) Memerintahkan para pelaksana perjalanan dinas di empat SKPD untuk mempertanggungjawabkan dengan menyeteror kelebihan biaya perjalanan dinas seluruhnya sebesar Rp146,18 juta ke Kas Daerah serta menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

BPK juga mengharapkan agar Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Galeri Foto



Penandatanganan BA Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi TA 2014 oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi



Anggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus



Sambutan Anggota V BPK RI dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi



Kepala Perwakilan menyerahkan LHP BPK TA 2014 kepada Bupati Muaro Jambi



Kepala Perwakilan menyerahkan LHP BPK TA 2014 kepada Bupati Tanjung Jabung Timur



Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2014



Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2014



Kepala Perwakilan menyerahkan LHP BPK TA 2014 kepada Walikota Jambi



Wartawan mewawancarai Anggota V BPK RI didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi selepas Rapat Paripurna Istimewa.



Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.



Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Sarolangun terkait tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.



Acara Buka Puasa Bersama pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 2015.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi Semester I Tahun 2015

BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah s.d. Semester I Tahun 2015 pada hari Rabu s.d. Kamis tanggal 10 s.d. 11 Juni 2015 bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Kegiatan yang diikuti oleh para pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan seluruh Inspektur pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jambi beserta staf dibuka oleh Kepala Subauditorat Jambi II, Andanu, S.E., M.Si., Ak. Didampingi oleh Ketua Tim Senior, Leny Angraini, S.E., Ak., M.H.



Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107



“Kebangkitan Nasional merupakan masa bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui gerakan organisasi modern yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan”.

Demikian sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika yang disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107 tahun 2015 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 di halaman gedung BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Lebih lanjut disampaikan tujuan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107 tahun 2015 adalah untuk memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya

visi dan misi sebagai bangsa yang maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kepala Subbagian Hukum, Handrias Haryotomo, S.H., M.H. dan sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Dra. Eliza, S.E., M.Si., Ak., CA. Upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini mengambil tema “Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Wujudkan Indonesia Maju Sejahtera”.



TEMP YAC

Dapur Kendali :
Subbagian Humas dan TU
BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No.65
Kel.Sukakarya Kec.Kotabaru
Jambi 36127

Brigade de cuisine - Tim Redaksi

Chef de cuisine : Eka Rosatiawan Rosadi
Sous-chef de cuisine : Margareta Puput Kurniawati
Cuisinier : Tuti Ariyani
Nelly Ika Puspita
Yunita Kurnia Putri
Pâtisier : Sandra Fitria Sari
M. Syahrain

